

KOMITMEN TANGANI STUNTING, PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RAIH PENGHARGAAN DARI WAPRES RI



Sumber Gambar:

<https://kanalmuria.com/wp-content/uploads/2023/10/28-INSENTIF-KUDUS.jpg>

Isi Berita:

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil meraih penghargaan berupa alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,37 miliar, atas komitmennya dalam penanganan stunting.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas C Penanggungungan menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan komitmen dan kolaborasi yang sudah berjalan, antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai program, seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan sesuai standar 10T, dan pemenuhan gizi ibu hamil KEK, serta pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, dan pemberian imunisasi lengkap.

“Penanganan stunting di Kudus ini dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi, kebersamaan dan guyub ini menjadi kunci,” jelas Bergas, se usai menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, saat rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil meraih penghargaan berupa alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,37 miliar, atas komitmennya dalam penanganan stunting.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas C Penanggungungan menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan komitmen dan kolaborasi yang sudah berjalan, antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai program, seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri, pemeriksaan

kehamilan sesuai standar 10T, dan pemenuhan gizi ibu hamil KEK, serta pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, dan pemberian imunisasi lengkap.

“Penanganan stunting di Kudus ini dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi, kebersamaan dan guyub ini menjadi kunci,” jelas Bergas, se usai menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, saat rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/komitmen-tangani-stunting-pemkab-kudus-raih-penghargaan-dari-wapres-ri/>, “Komitmen Tangani Stunting, Pemkab Kudus Raih Penghargaan dari Wapres RI”, tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://kanalmuria.com/dinilai-berhasil-tangani-stunting-pemkab-kudus-dapat-insentif-fiskal-rp-737-miliar/>, “Dinilai Berhasil Tangani Stunting, Pemkab Kudus Dapat Insentif Fiskal Rp 7,37 Miliar”, tanggal 9 Oktober 2023.
3. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/400493/terima-rp-7-3-m-kudus-sisir-stunting-hingga-wilayah-pinggiran>, “Terima Rp 7,3 M, Kudus Sisir Stunting Hingga Wilayah Pinggiran”, tanggal 9 Oktober 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
 3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid

⁴ Ibid